



Lampiran

PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LIMA TAHUN KEDEPAN

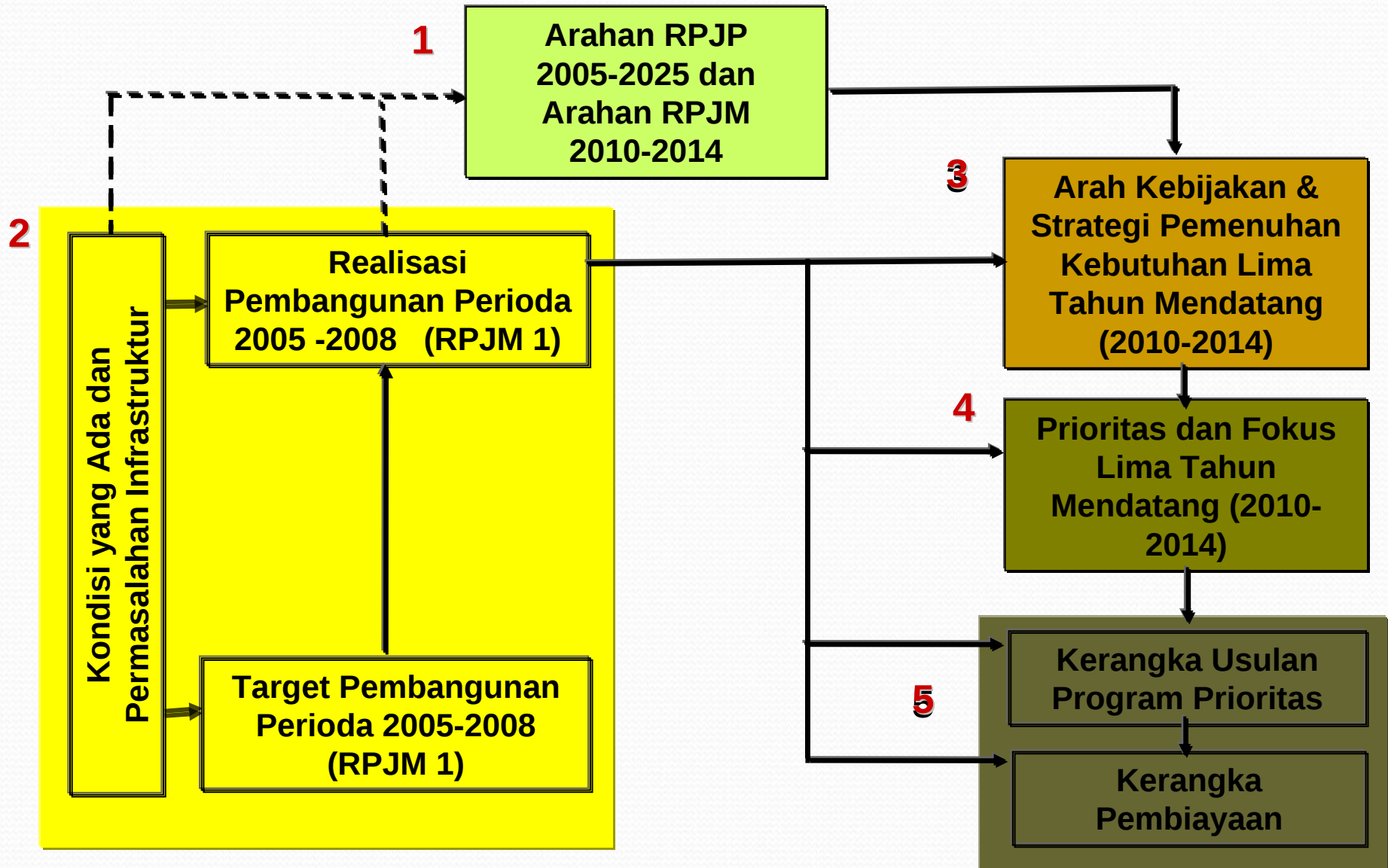
MUKERNAS LPJK

Hotel Mercure Ancol Jakarta, 11 Maret 2009

H. Paskah Suzetta

MENNEG PPN / KEPALA BAPPENAS

KERANGKA MATERI PRESENTASI





BAGIAN 1

ARAHAN RPJP 2005 - 2025
ARAHAN RPJM 2010 - 2014

Dasar Penetapan Sasaran Penyediaan Infrastruktur

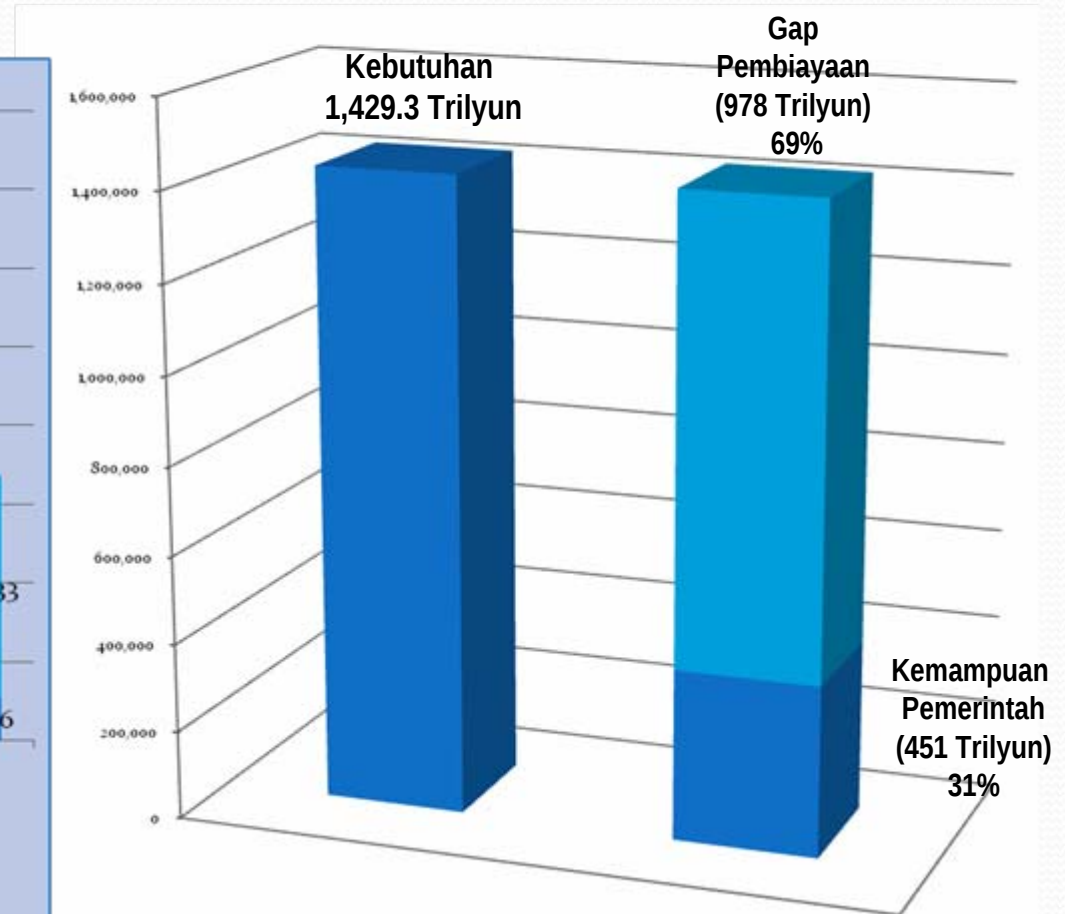
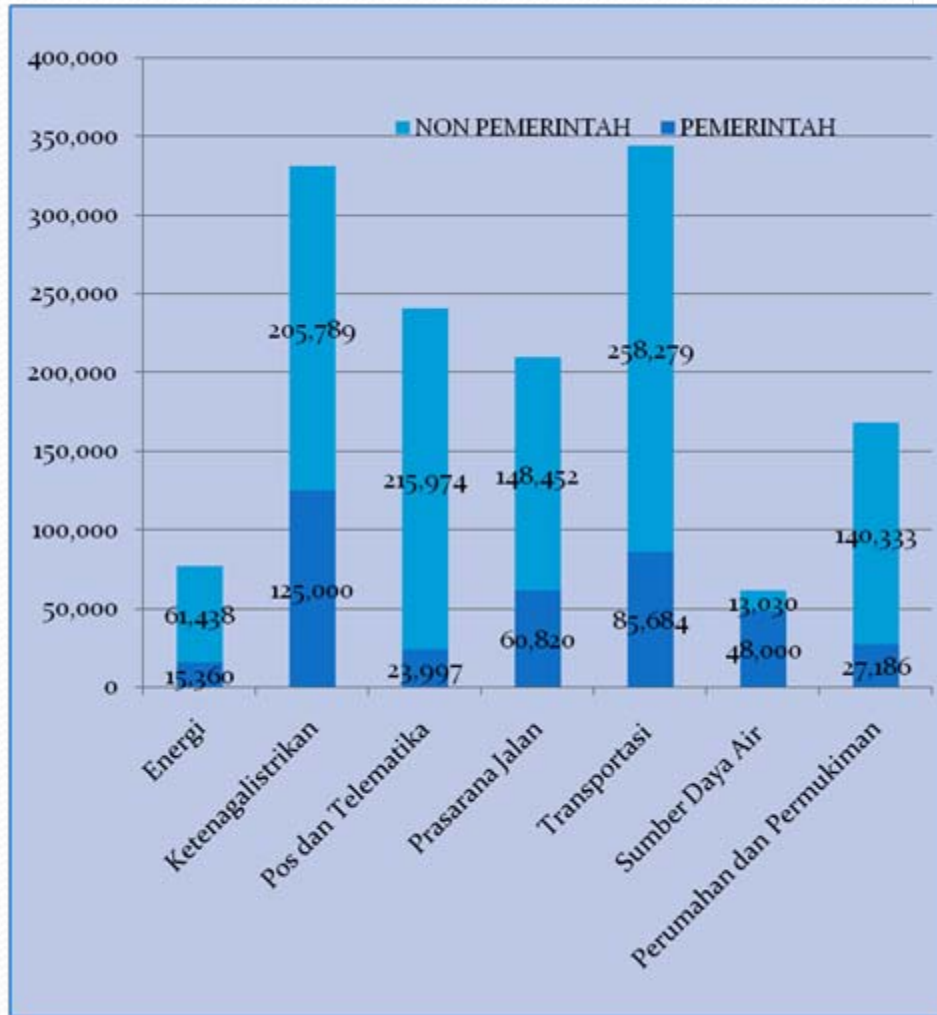
- **Kebutuhan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
- **Pencapaian target MDG Air Minum dan Sanitasi**
- **Ketentuan dalam Undang-Undang (mis: UU Persampahan; UU Sumber Daya Air)**
- **Peningkatan daya saing internasional**
- **Keselamatan transportasi**
- **Membuka daerah perbatasan, terisolasi, dan pulau-pulau terluar (kegiatan keperintisan)**
- **Optimalisasi pemanfaatan TIK secara sinergi**
- **Mendukung pemenuhan ketahanan energi nasional termasuk mengatasi krisis listrik**
- **Dukungan terhadap ketahanan pangan**
- **Dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup**

Asumsi Perhitungan Kebutuhan Investasi Infrastruktur

- Pada Tahun 2010 - 2014 diharapkan investasi infrastruktur naik secara gradual dari 3.25% menjadi 5% dari PDB.
- Kemampuan APBN membiayai pembangunan infrastruktur dari tahun 2010 - 2014 sekitar 2 kali dari kemampuan Pemerintah pada tahun 2005 – 2009.
- Gap Pembiayaan investasi infrastruktur diupayakan melalui kerjasama Pemerintah Swasta (PPP).
- 20% dari biaya proyek PPP merupakan dukungan pemerintah.

KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2010 - 2014

(Milyar Rp.)

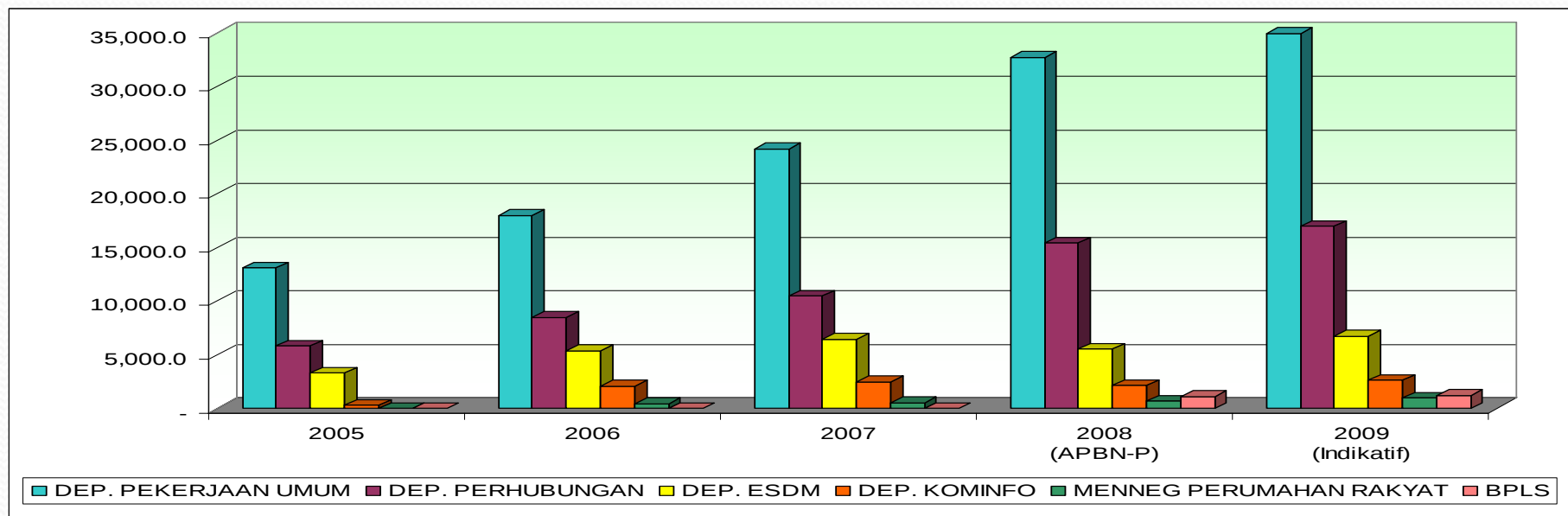


GAP PEMBIAYAAN diharapkan dapat didanai melalui pengembangan KPS, privatisasi, CSR, dan partisipasi masyarakat

Kebutuhan Vs Kemampuan Proyek PPP 2010 - 2014

- Kebutuhan investasi proyek PPP sebesar Rp. 978 Triliun
- Prediksi Kemampuan pelaksanaan proyek PPP hanya mencapai sekitar Rp. 363 Triliun.
- Kebutuhan investasi proyek PPP hanya dapat dicapai melalui:
 - Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan.
 - Peningkatan kemampuan penyiapan proyek PPP.
 - Peningkatan keamanan berinvestasi.
 - Kemudahan mengakses sumber dana yang diperlukan oleh investor.

Alokasi Pendanaan Infrastruktur 2005-2009 (APBN)



	2005	2006	2007	2008 (APBN-P)	2009 (Indikatif)	Total
DEP. PEKERJAAN UMUM	13,082	18,014	24,213	32,710	34,987	123,006
DEP. PERHUBUNGAN	5,826	8,452	10,468	15,399	16,978	57,123
DEP. ESDM	3,297	5,382	6,458	5,508	6,745	27,390
DEP. KOMINFO	279	2,062	2,459	2,129	2,601	9,529
MENNEG PERUMAHAN RAKYAT	-	414	533	675	964	2,585
BPLS	-	-	-	1,100	1,194	2,294
TOTAL	22,484	34,324	44,131	57,520	63,470	221,929

PRIORITAS INVESTASI INFRASTRUKTUR 2010 - 2014

NO	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	
		CONTOH PROGRAM UTAMA	CONTOH KEGIATAN PRIORITAS
1	Energi	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Pembangunan infrastruktur minyak; pembangunan infrastruktur gas Pengembangan EBT; Program kemitraan dalam rangka konservasi Energi; Energi Efisiensi Pengembangan dan penggunaan energi alternatif; Peningkatan peran serta pemda, koperasi dan masyarakat dalam penyediaan energi
2	Ketenaga listrikian	Program Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kuantitas Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana Ketenagalistrikan Yang Semakin Ramah Lingkungan Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Produksi dan Konsumsi Ketenagalistrikan	Pembangunan pembangkit 17.773MW; Jaringan transmisi 4800kms; Distribusi 52.000MVA; Pengembangan sistem informasi; Pengembangan kebijakan, regulasi, monitoring, dan pengendalian Rehabilitasi dan Modernisasi Jaringan Distribusi (tersebar) 12.000MVA; Pengembangan regulasi, kebijakan, monitoring dan pengendalian
3	Pos dan Telematika	Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telematika Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Peningkatan e-Literasi	Fasilitasi pembangunan backbone Palapa Ring; Implementasi penyiaran digital; pembangunan tingkat penetrasi akses telekomunikasi sekurang ² nya 15%; Penyediaan jasa akses pos dan telematika di wilayah non komersial hingga menjangkau 100% wilayah USO, PSO dan <i>blankspot</i> Peningkatan e-literasi sekurang-kurangnya mencapai 80%; Pengembangan e-government
4	Jalan dan Transportasi Darat	Program Pelayanan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	Pembangunan Tol 500 km, Pembangunan Jalan Lintas 8,450 km Pembangunan dermaga penyeberangan dan Subsidi angkutan darat perintis
5	Transportasi Laut	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Kapal dan fasilitas keselamatan pelayaran, Penyediaan Subsidi perintis
6	Transportasi Udara	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara	Pembangunan Bandara dan Sarana Angkutan Perintis
7	Perkeretaapian	Program Peningkatan Pelayanan Perkeretaapian	MRT Jabodetabek, Pembangunan Jalur Ganda, dan double-double track
8	Sumber Daya Air	Program Konservasi Sumber Daya Air Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	Pembangunan Waduk (mengatasi defisit air Jawa, Nusa Tenggara, dan wilayah strategis) Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa; Pemenuhan Air Baku (10 juta air minum)
9	Perumahan dan Permukiman	Program Pengendalian Daya Rusak Air Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman	Pengendalian Banjir Perkotaan dan Pengamanan Pantai Penyediaan hunian sewa dan milik; pembangunan Rusunawa; Penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan rumah sederhana sehat; peningkatan akses kredit mikro pembangunan/perbaikan rumah. Penyediaan air minum dan sanitasi 10 juta sambungan rumah air bersih (target MDG), pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat, peningkatan kinerja pengelolaan TPA menjadi <i>sanitary landfill</i> Penataan kawasan kumuh untuk memenuhi target MDG; Peningkatan kualitas desa tradisional/nelayan/dan eks transmigrasi

Target Infrastruktur 2010 - 2014

Infrastruktur	Target
Sumber Daya Air	▪ Penambahan kapasitas bangunan penampung air sebesar 1,9 milyar m³ ▪ Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 650 ribu Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 900 ribu Ha ▪ Penurunan luas daerah genangan banjir seluas 12 ribu Ha dan pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 1,5 ribu Ha
Transportasi	▪ Kondisi jalan nasional mantap 100% (baik 56,8% dan sedang 43,2%, tidak ada rusak ringan dan rusak berat) ▪ Kecepatan rata-rata 60 Km/jam ▪ Berth Occupancy Ratio (BOR) Pelabuhan 70% ▪ Rasio penumpang domestik per penduduk 48,8% ▪ Pangsa angkutan KA barang 7% dan angkutan orang 23% dari total angkutan nasional.
Energi	▪ Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) minimal 14,1% dari konsumsi energi nasional
Ketenagalistrikan	▪ Rasio elektrifikasi 80,4%
Pos dan Telematika	▪ Peningkatan e-literasi sekurang-kurangnya 80% ▪ Pengembangan tingkat penetrasi akses telekomunikasi sekurang-kurangnya 115%
Pemukiman dan Perumahan	▪ Penyediaan rumah 8,4 juta unit ▪ Cakupan pelayanan air minum 70,2%, air limbah 80,02% ▪ Presentase sampah terangkut 50%

ARAHAN RPJP 2005-2025

VISI 2005-2025
MAJU, MANDIRI, ADIL, MAKMUR

MISI 2005-2025

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional



Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju

- Fokus pemerintah pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, dan peningkatan peran swasta (KPS)
- Pembangunan prasarana sumber daya air
- Pembangunan transportasi
- Pembangunan pos dan telematika
- Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan
- Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi

- Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri
- Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi

- Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.
- Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.
- Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi.
- Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.
- Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.

- Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2005-2025

RPJM 1 (2005 – 2009)	RPJM 2 (2010 – 2014)	RPJM 3 (2015 – 2019)	RPJM 4 (2020 – 2025)
▪ Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan.	▪ Percepatan pemb. infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha ▪ Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika ▪ Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan ▪ Pengembangan sumber daya air & pengembangan perumahan & permukiman.	▪ Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang ▪ Berkembangnya jaringan transportasi ▪ Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yg handal & efisien ▪ Mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik ▪ Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar ▪ Pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian. ▪ Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jngk pnjang. ▪ Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.	▪ Kondisi maju & sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yg andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI ▪ Tercapainya elektrifikasi perdesaan & elektrifikasi rumah tangga; ▪ Terpenuhinya kebutuhan hunian yg dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yg didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.



2. Kondisi Eksisting

KONDISI DAYA SAING INDONESIA MENURUT World Economic Forum (WEF)

Peringkat Growth Competitiveness Index/GCI
(2003 - 2008)

	Argentina	Indonesia	Philipines	Brazil	Korea	China	Japan	Thailand	Malaysia
2003	78	72	66	54	18	44	11	32	29
2004	74	69	76	57	29	46	9	34	31
2005	72	74	77	65	17	49	12	36	24
2007	85	54	71	72	11	34	8	28	21
2008	88	55	71	64	13	30	9	34	21

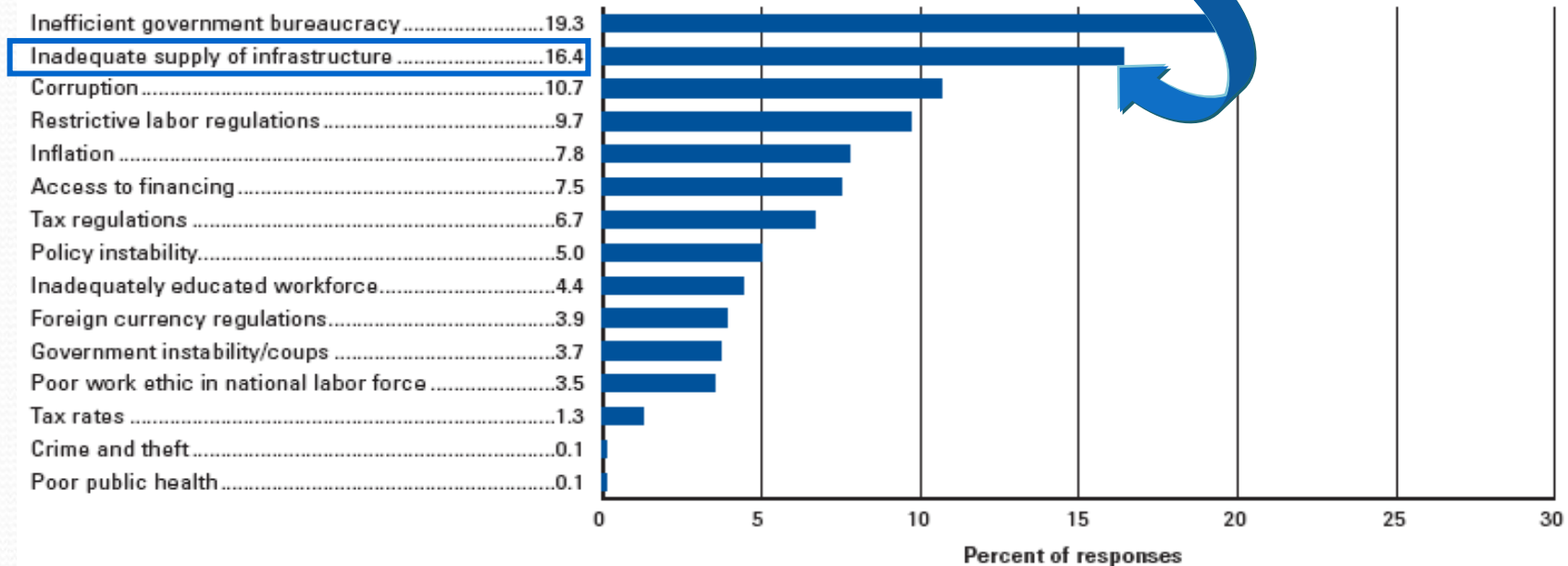
Catatan: tahun 2003 mencakup 101 negara, 2004 mencakup 104, & 2005 mencakup 117 negara, tahun 2007 mencakup 131 negara, tahun 2008 mencakup 134 negara

Sumber: *World Economic Forum*

- Tantangan mendorong investasi baik PMA maupun PMDN sangat berat.
- Daya saing nasional yang rendah
 - Menurut *World Economic Forum* (WEF), posisi daya saing Indonesia tahun 2008 berada pada urutan 55 dari 134 negara. Sedangkan Malaysia pada urutan ke-21 dan Thailand urutan ke-34

Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia

The most problematic factors for doing business



Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

The Global Competitiveness Report 2008-2009 © 2008 World Economic Forum

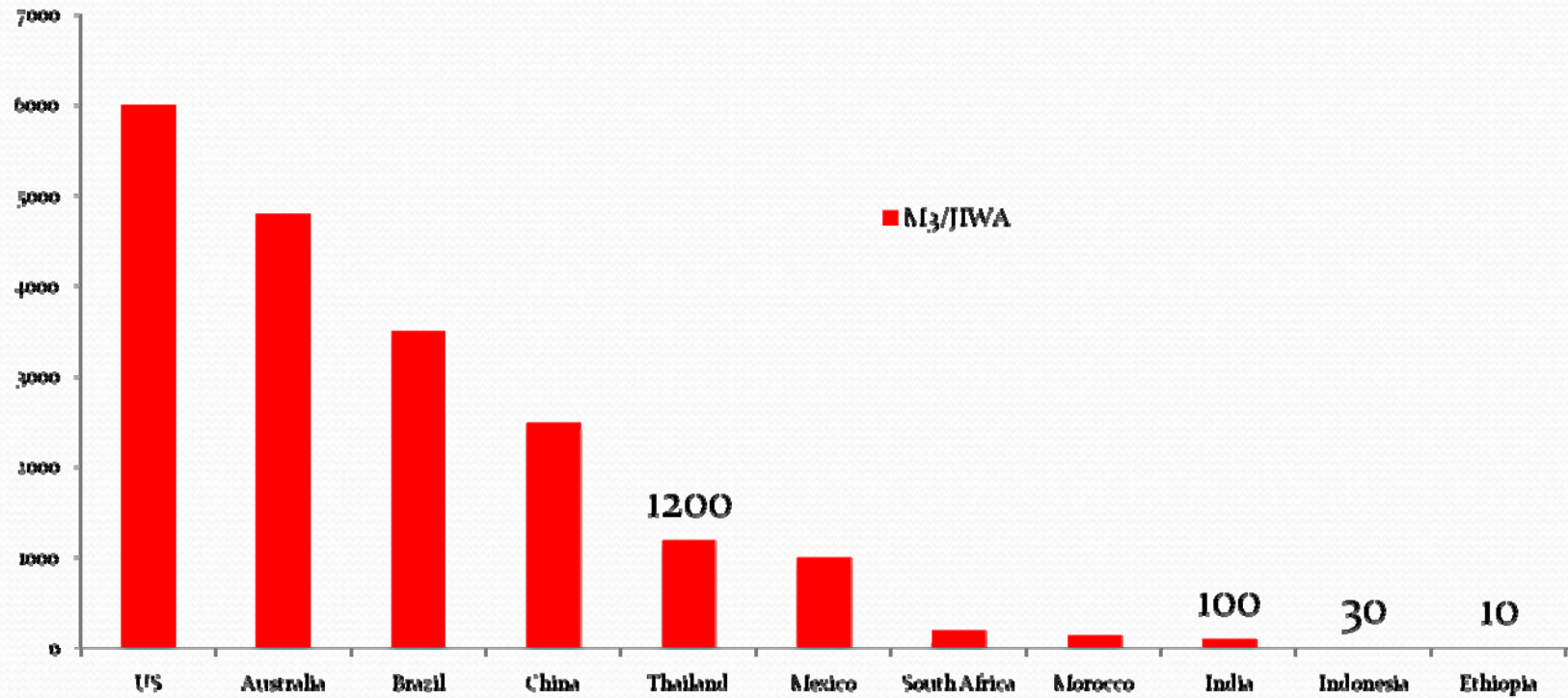
Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia Tahun 2008

World Competitiveness Report, 2008 – 2009 (134 negara)

	Argentina	Indonesia	Philippines	Brazil	Korea	China	Vietnam	Thailand	Malaysia
Infrastructure	89	96	94	98	18	58	97	35	19
Roads	89	105	94	110	13	51	102	32	17
Railroad	76	58	85	86	7	28	66	48	17
Port	92	104	100	123	29	54	112	48	16
Air Transport	123	75	89	101	26	74	92	28	20
Electricity	102	82	82	58	21	68	104	43	71
Telephone	57	100	105	62	17	47	37	86	31

Daya Saing SDA

KAPASITAS TAMPUNGAN AIR PER KAPITA

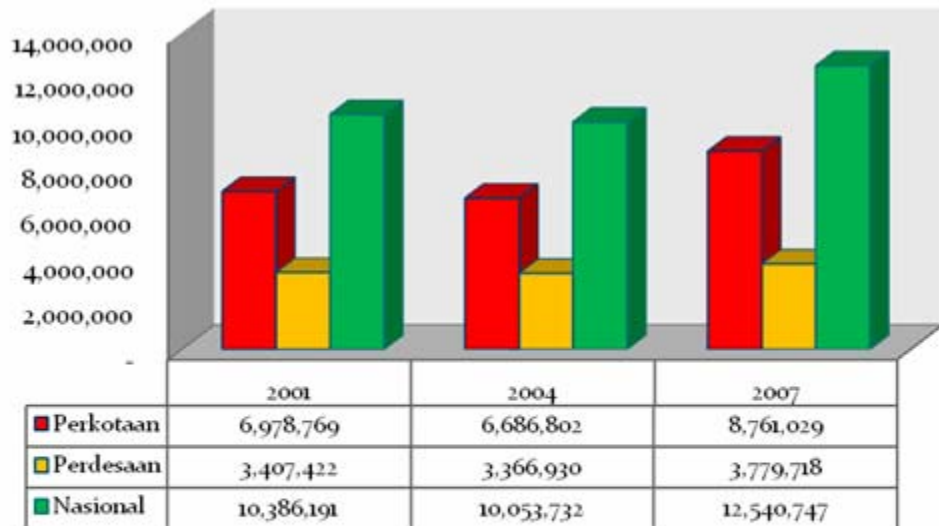


Source: World Bank (2005)

Perumahan

Rumah (papan) merupakan tempat persemaian budaya dan pembinaan sumberdaya manusia.

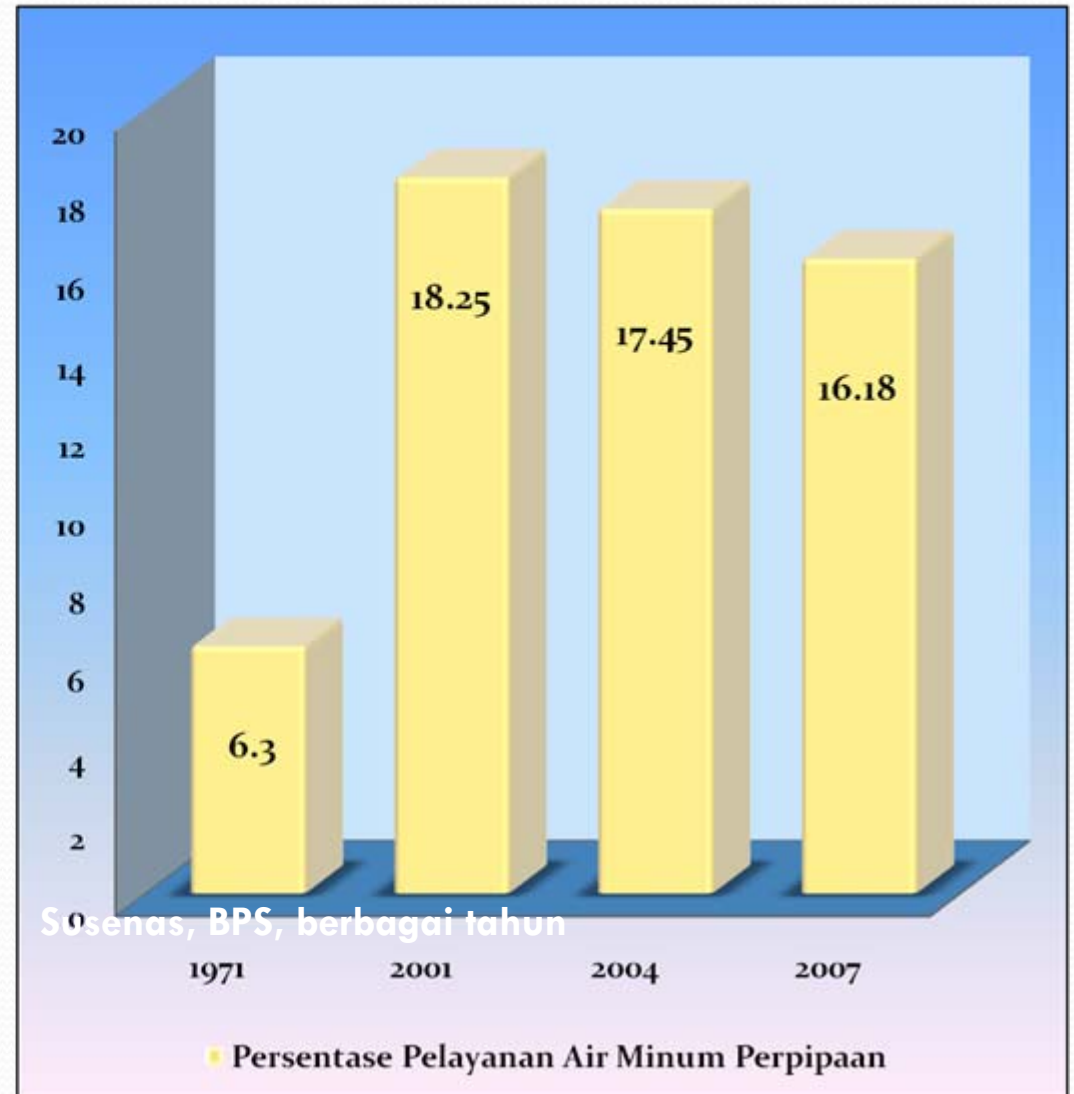
Jumlah Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah
Tahun 2001, 2004, dan 2007 (BPS)



- Sandang, (pangan → Swasembada)
- Hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar (UUD 1945 pasal 28H) belum mendapat perhatian yang memadai → *class action*
- Mendorong lebih dari 100 jenis industri ikutan (*backward - forward linkages*)
- Rasio outstanding kredit perumahan thd PDB
 - USA (47%)
 - Malaysia (27 %)
 - Indonesia (1,8%)
- Subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) rata-rata 110 ribu unit per tahun.

Air Minum

- Lambatnya pertumbuhan cakupan pelayanan air minum perpipaan dari 6,3% → 18,25% (1971- 2001)
- 2001-2007 terus menurun menjadi 16,18%.
- Kemampuan *supply* tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk.



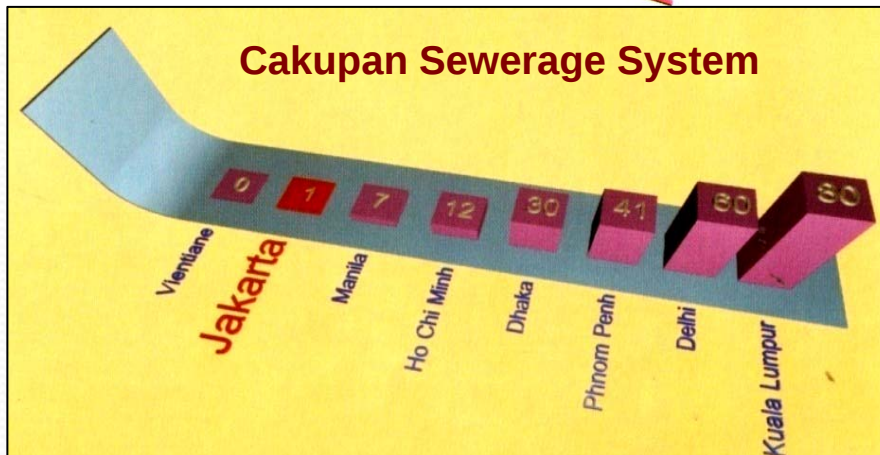
Sanitasi di Indonesia: Risiko & Manfaat

20

Jumlah Penduduk Tanpa Akses thd Sanitasi Dasar (juta jiwa)



Cakupan Sewerage System



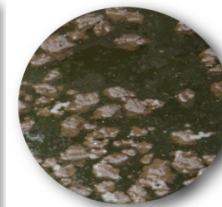
Jangan bandingkan cakupan sewerage system yang ada di Jakarta dengan kota besar di negara-negara di wilayah Asia. Ibu Kota kita sudah tertinggal jauh dari Ho Chi Minh (Vietnam), Manila (Filipina), Kathmandu (Nepal) dan Dhaka (Bangladesh). Jakarta hanya lebih baik dari Vientiane ibu kota Lao PDR.

Akibat sanitasi buruk:

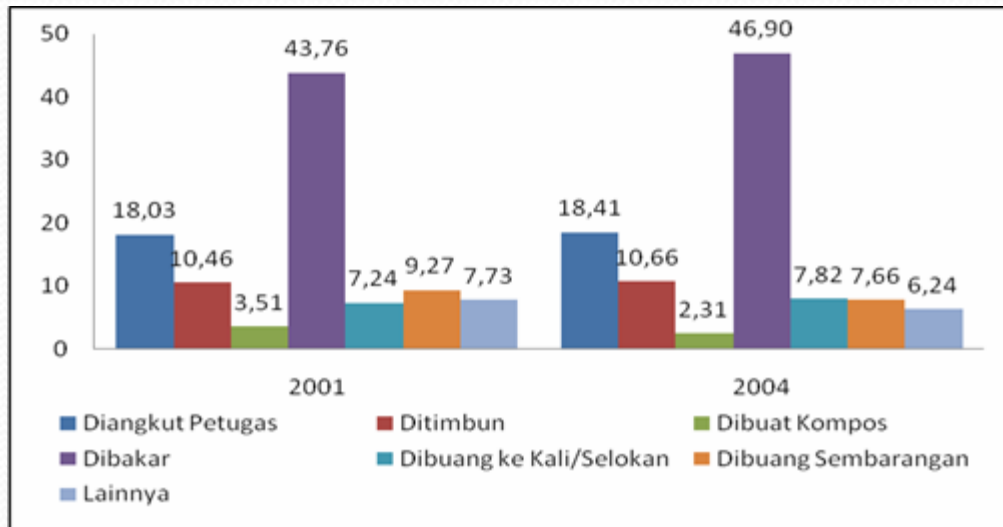
- 75 % air sungai tercemar
- 70 % air tanah tercemar
- 150 ribu orang meninggal per tahun akibat diare
- Setiap tambahan konsentrasi pencemaran BOD sebesar 1 mg/liter pada sungai → menyebabkan kenaikan biaya produksi PDAM sekitar 25% dari rata-rata tarif air nasional.
- Kerugian ekonomi yang terkait sanitasi yang buruk diperkirakan sekitar US\$ 6,3 miliar per tahun, (2,3 % dari GDP).

Investasi pemerintah Rp. 200/orang/tahun, Kalau saja dilakukan investasi infrastruktur sanitasi sekitar Rp 47.000/kapita/tahun →

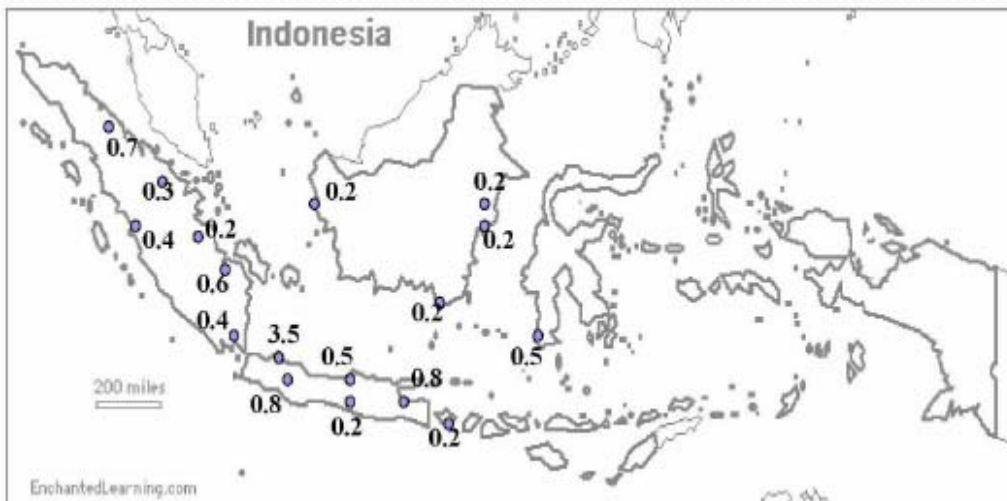
- Meningkatkan waktu produktif masyarakat sekitar 34% - 79%.
- Mengurangi biaya kesehatan 6% - 19% dan mengurangi biaya pengobatan sekitar 2% - 5%.



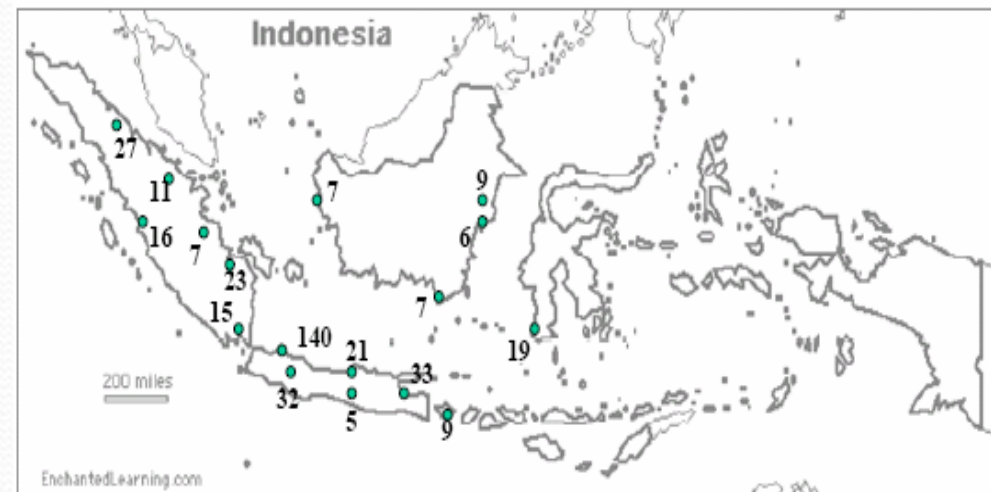
PERSAMPAHAN



- Baru 18,41% sampah terangkut, sisanya **dibakar, ditimbun, dibuang ke kali dan dibuang sembarangan**
- Hanya **2% TPA** yang menggunakan **sistem sanitary landfill**
- Berkontribusi pada **global warming** → **climate change**
- Dampak lainnya: **banjir, pencemaran lingkungan**



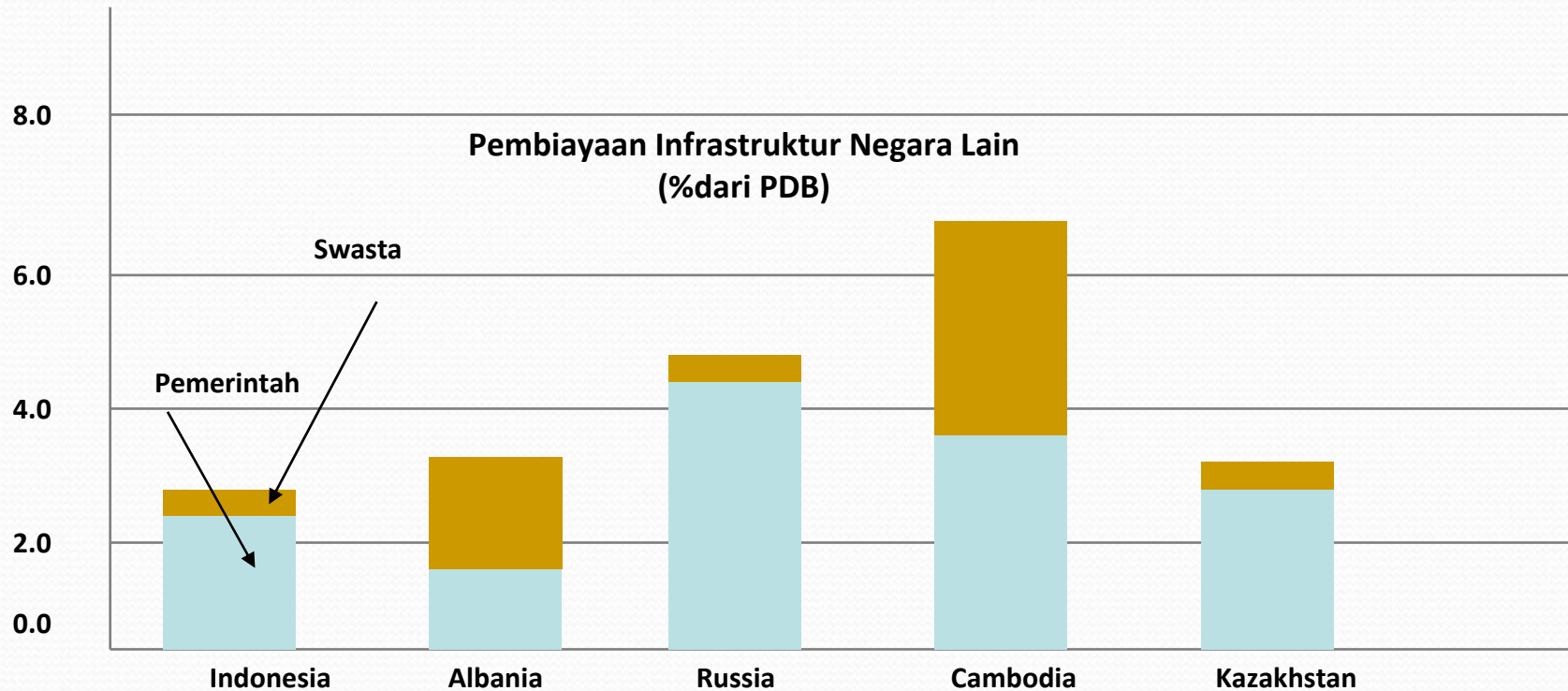
10 juta ton/year



404 juta m3 of metan

(CH4) per tahun

Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Semakin Menurun (PPP)



Sumber : Bank Dunia 2004

- Untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 6% per tahun, maka dibutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% per tahun dari total PDB.
- Apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki angka pembiayaan terendah serta peranan swasta yang tidak signifikan.

TINGKAT RISIKO BERINVESTASI DALAM PROYEK KPS DI BEBERAPA NEGARA ASIA

RANK	CINA	INDONESIA	MALAYSIA	SINGAPURA	THAILAND	VIETNAM	TOTAL
1	Risiko Hukum dan regulasi	Risiko Politik	Risiko Permintaan	Risiko Permintaan	Risiko Politik	Risiko Hukum dan regulasi	Risiko Permintaan
2	Risiko Lingkungan	Risiko Hukum dan regulasi	Risiko Mitra Kerja	Risiko Persediaan (Supply Risk)	Risiko Permintaan	Risiko Permintaan	Risiko Penyelesaian Proyek
3	Risiko Politik	Risiko Penyelesaian Proyek	Risiko Penyelesaian Proyek	Risiko Lingkungan	Risiko Penyelesaian Proyek	Risiko Nilai Tukar Mata Uang	Risiko Politik
4	Risiko Mitra Kerja	Risiko Mitra Kerja	Risiko Persediaan (Supply Risk)	Risiko Teknis	Risiko Hukum dan regulasi	Risiko Mitra Kerja	Risiko Mitra Kerja
5	Risiko Permintaan	Risiko Operasional	Risiko Lingkungan	Risiko Penyelesaian Proyek	Risiko Persediaan (Supply Risk)	Risiko Penyelesaian Proyek	Risiko Hukum dan regulasi
6	Risiko Operasional	Risiko Persediaan (Supply Risk)	Risiko Politik	Risiko Operasional	Risiko Mitra Kerja	Risiko Politik	Risiko Persediaan (Supply Risk)
7	Risiko Persediaan (Supply Risk)	Risiko Permintaan	Risiko Operasional	Risiko Mitra Kerja	Risiko Nilai Tukar Mata Uang	Risiko Persediaan (Supply Risk)	Risiko Lingkungan
8	Risiko Teknis	Risiko Teknis	Risiko Hukum dan regulasi	Risiko Nilai Tukar Mata Uang	Risiko Lingkungan	Risiko Operasional	Risiko Operasional
9	Risiko Nilai Tukar Mata Uang	Risiko Lingkungan	Risiko Teknis	Risiko Politik	Risiko Operasional	Risiko Lingkungan	Risiko Nilai Tukar Mata Uang
10	Risiko Penyelesaian Proyek	Risiko Nilai Tukar Mata Uang	Risiko Nilai Tukar Mata Uang	Risiko Hukum dan regulasi	Risiko Teknis	Risiko Teknis	Risiko Teknis

KESEMPATAN BERINVESTASI BERDASARKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR

RANK	CINA	INDONESIA	MALAYSIA	SINGAPURA	THAILAND	VIETNAM	KESELURUHAN
1	MRT	JALAN TOL	MRT	MRT	MRT	JALAN TOL	MRT
2	JALAN TOL	PELABUHAN LAUT	JALAN TOL	PELABUHAN LAUT	JALAN TOL	PELABUHAN LAUT	JALAN TOL
3	PELABUHAN LAUT	MRT	PELABUHAN LAUT	JALAN TOL	PELABUHAN LAUT	MRT	PELABUHAN LAUT
4	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)	BANDAR UDARA	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)	BANDAR UDARA	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)	BANDAR UDARA	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)
5	BANDAR UDARA	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)	BANDAR UDARA	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)	BANDAR UDARA	PERKERETAAPIAN (HEAVY RAIL)	BANDAR UDARA



BAGIAN 3

Kebijakan Stimulus Infrastruktur 2009

LATAR BELAKANG

- Krisis Global memberikan Dampak kepada Perekonomian Nasional berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ekspor, penurunan produksi, peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
- Diperlukan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional Tahun 2009
- Salah satu kebijakan pemerintah adalah memberikan stimulus fiskal yang terarah pada pembangunan infrastruktur.
- Jasa konstruksi diharapkan berperan maksimal dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam dua atau tiga tahun mendatang, karena dampak dari krisis keuangan global masih akan dirasakan Indonesia dalam kurun waktu tersebut

Kriteria Kegiatan Stimulus

- Menciptakan lapangan kerja yang signifikan
- Hasilnya seketika dan dapat diselesaikan dalam tahun 2009
- Memenuhi sasaran Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus Program Ekonomi 2008-2009
- Melengkapi sistem jaringan infrastruktur agar lebih efisien
- Merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah
- Sudah memiliki desain atau dapat menyiapkan desain secara cepat
- Tidak tersangkut dengan masalah tanah
- Dipastikan dapat diserap pada tahun 2009

ALOKASI DANA STIMULUS INFRASTRUKTUR 2009

Pengguna Anggaran	Program/Kegiatan	Alokasi
Dept. PU	Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	<u>6.601.200.000.000</u>
Dephub	Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	<u>2.198.800.000.000</u>
Dept. ESDM	EnergiPekerjaan Umum	<u>500.000.000.000</u>
Kemenpera	Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan Rakyat	<u>400.000.000.000</u>
Dept. K & P	Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Khusus	<u>100.000.000.000</u>
Dept. Pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Irigasi Tingkat Usaha Tani	<u>650.000.000.000</u>
Kemenko & UKM	Pembangunan Infrastruktur Pasar	<u>100.000.000.000</u>
Dept. Perdagangan	Pembangunan Infrastruktur Pasar	<u>215.000.000.000</u>
Depnakertrans	Peningkatan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan	<u>300.000.000.000</u>
Depkes	Pembangunan Infrastruktur Bidang kesehatan	<u>150.000.000.000</u>
BUN	Subsidi dan Lainnya	<u>485.000.000.000</u>
BUN (BUMN)	Penyertaan Modal Negara	<u>500.000.000.000</u>
TOTAL	INFRASTRUKTUR	<u>12.200.000.00</u> 0

PERINCIAN ALOKASI

DANA STIMULUS FISKAL UNTUK INFRASTRUKTUR 2009

(1)

Pengguna Anggaran	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)
Dept. PU	<u>Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum</u>	<u>6.601.200.000.000</u>
	• Penanganan bencana (termasuk Bengawan Solo)	700.000.000.000
	• Perluasan jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengelolaan air minum	449.970.000.000
	• Percepatan penyelesaian infrastruktur lanjutan	900.000.000.000
	• Jalan inspeksi dan irigasi sentra produksi tambak	424.000.000.000
	• rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan	461.000.000.000
	• Jalan, jembatan, dan irigasi	3.423.230.000.000
	• Pengembangan infrastruktur permukiman	243.000.000.000

PERINCIAN ALOKASI

DANA STIMULUS FISKAL UNTUK INFRASTRUKTUR 2009 (2)

Pengguna Anggaran	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)
Dephub	Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	<u>2.198.800.000.000</u>
	• Pembangunan dan rehabilitasi jaringan KA	300.000.000.000
	• Reavitalisasi/reaktivasi KA	100.000.000.000
	• Perpanjangan runway dan rehabilitasi bandara	145.192.000.000
	• Bandara	714.000.000.000
	• Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan dan dermaga	179.808.000.000
	• Pelabuhan laut dan penyebrangan	702.000.000.000
	• Perhubungan darat	57.800.000.000
Dept. ESDM	EnergiPekerjaan Umum	<u>500.000.000.000</u>
	Pembangunan transmisi, jaringan, dan gardu induk	425.000.000.000
	Desa Mandiri Energi	75.000.000.000

PERINCIAN ALOKASI

DANA STIMULUS FISKAL UNTUK INFRASTRUKTUR 2009 (3)

Pengguna Anggaran	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)
Kemenpera	Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan Rakyat Pembangunan rusunawa (40 twin blok)	<u>400.000.000.000</u> 400.000.000.000
Dept. K & P	- Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Khusus (NELAYAN) - Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Khusus (nelayan)	<u>100.000.000.000</u> 100.000.000.000
Dept. Pertanian	- Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Irigasi Tingkat Usaha Tani - Jalan produksi sentra produksi perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan	650.000.000.000
Kemenko & UKM	Pembangunan Infrastruktur Pasar Pembangunan pasar untuk pembinaan PKL	100.000.000.000
Dept. Perdagangan	Pembangunan Infrastruktur Pasar Pembangunan pasar tradisional	215.000.000.000

PERINCIAN ALOKASI

DANA STIMULUS FISKAL UNTUK INFRASTRUKTUR 2009 (4)

Pengguna Anggaran	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)
Depnakertrans	Peningkatan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan	<u>300.000.000.000</u>
	• Pelatihan ketrampilan oleh BLK	136.000.000.000
	• Peningkatan sarana dan prasarana BLK	164.000.000.000
Depkes	Pembangunan Infrastruktur Bidang kesehatan	<u>150.000.000.000</u>
	Pembangunan World Class Hospital RSCM	150.000.000.000
BUN	Subsidi dan Lainnya	<u>485.000.000.000</u>
	• Subsidi untuk obat generik	350.000.000.000
	• Subsidi bunga untuk air bersih	15.000.000.000
	• Revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer di daerah sentra produksi pangan	120.000.000.000
BUN (BUMN)	Penyertaan Modal Negara	<u>500.000.000.000</u>
	• PMN kepada Jamkrindo dan Askrindo	500.000.000.000



BAGIAN 4

Arah Kebijakan & Strategi Lima Tahun Mendatang (2010-2014)

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Sumber Daya Manusia

- Pencapaian target MDG Air Minum dan Sanitasi
- Mendukung ketahanan pangan nasional

Penanggulangan Kemiskinan

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (perumahan, permukiman, transportasi, air baku, listrik, energi, telekomunikasi)

Penciptaan Lapangan Kerja

- Pengembangan kerjasama dengan swasta dan masyarakat
- Percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur padat karya

Kesenjangan antar wilayah

- Penyediaan infrastruktur perdesaan (jalan, listrik, pos dan telematika)
- Penyediaan infrastruktur di wilayah non komersial

Adaptasi dan Mitigasi Climate Change

- Pemanfaatan Energi terbarukan dan energi alternatif
- Pengendalian daya rusak air (banjir, kekeringan, dan abrasi pantai)

Peningkatan Daya Saing Industri

- Pemenuhan kebutuhan energi dan listrik nasional
- Pengembangan jaringan transportasi
- Pengembangan infrastruktur TIK

1. Sumber Daya Air

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PENGELOLAAN TERPADU (Konservasi, Pendayagunaan, Pengendalian Daya Rusak) dalam satu kesatuan pengelolaan WS, berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan	Menjaga keseimbangan ketersediaan air dalam perspektif ruang dan waktu Pemenuhan kebutuhan air irigasi dan rawa diutamakan untuk mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi Penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan wilayah sungai dengan memperhatikan keterpaduan tata ruang wilayah. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga termasuk di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.
Memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat hulu dan hilir secara seimbang dan berkeadilan	Pengembangan pola hubungan hulu-hilir agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan;
Pengelolaan yang memadukan upaya-upaya pada aspek pengelolaan sumber air dengan pengaturan pemakaiannya.	Pengembangan sistem <i>conjunctive use</i> antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
Pengembangan modal sosial (social capital) melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan pola kemitraan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik sosial budaya setempat.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan dalam setiap upaya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air Dalam upaya memperkokoh civil society, keterlibatan masyarakat, BUMN/D dan swasta perlu terus didorong.
Penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air sehingga mampu mengkoordinasikan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan.	Pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Membentuk dan memperkuat lembaga dewan sumber daya air dan komisi irigasi, ditujukan sebagai instrumen kelembagaan untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat sehingga dapat mengurangi potensi konflik air.

2. Transportasi: Subsektor Jalan dan Perkeretaapian

ARAH KEBIJAKAN

Sub sektor jalan

- Pemeliharaan rutin dan periodik jalan dan jembatan;
- Rehabilitasi/pelebaran/perkuatan dan penggantian jembatan;
- Peningkatan struktur/rekonstruksi jalan;
- Peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan;
- Pembangunan simpang tidak sebidang, jalan bebas hambatan, jembatan panjang.

Sub sektor perkeretaapian

- Meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan serta pemulihan kondisi pelayanan angkutan perkeretaapian;
- Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian;
- Meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antar moda dan inter moda;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan koridor yang telah jenuh;
- Melaksanakan perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan;
- Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan BUMN perkeretaapian;
- Meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan Swasta di bidang perkeretaapian;
- Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal

STRATEGI

- Pembangunan infrastruktur berbasis subsektor dan perpulau
- Penyelesaian Masterplan Transportasi Pulau
- Menunjang PLT 10.000 Mega Watt
- Fokus pada infrastruktur perkotaan untuk pulau Jawa
- Fokus pada infrastruktur laut untuk KTI
- Inpres Papua
- Melibatkan Sektor Perbankan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan Prasarana Transportasi
- Deregulasi sektor Transportasi untuk keterlibatan swasta

2. Transportasi: Subsektor Transportasi Laut dan Udara

ARAH KEBIJAKAN

Transportasi Laut

- Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran
- Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan di wilayah terpencil/terluar
- Menciptakan komptisi dan memberi kesempatan yg lebih luas kepada swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi laut
- Menampung perkembangan angkutan multimoda
- Mengakomodasi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional

Transportasi Udara

- Pemisahan secara tegas fungsi regulator, operator dan owners (airline) pengelolaan transportasi udara.
- Meningkatkan kapasitas prasarana bandara untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.
- Memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional.
- Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang transportasi udara.
- Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang transportasi udara.
- Peningkatan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam bidang transportasi udara.
- Transportasi udara diprioritaskan untuk angkutan penumpang jarak jauh (untuk angkutan jarak pendek dan menengah diprioritaskan untuk moda kereta api dan angkutan jalan).

STRATEGI

- Membangun sistem pelayanan terpadu di pelabuhan-pelabuhan (National Single Window)
- Pembangunan fasilitas pelabuhan di pelabuhan strategis
- Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan feeder kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi rentang kendali pengawasan dan mengurangi jumlah pegawai.
- Pembangunan infrastruktur bandara di ibukota provinsi/kabupaten

3. Energi

ARAH KEBIJAKAN

- Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama untuk menjamin pasokan tenaga listrik secara nasional khususnya di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan secara efisien dan handal;
- Peningkatan optimalisasi energi mix untuk bidang ketenagalistrikan (memprioritaskan pada pengembangan energi terbarukan);
- Penyesuaian tarif yang sesuai dengan keekonomiannya yang berkeadilan;
- Terlaksana penyempurnaan sinkronisasi kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan serta berbagai kebijakan dan regulasi sektor lainnya yang terkait, khususnya di bidang pemanfaatan energi primer non BBM untuk pembangkit listrik terutama energi baru terbarukan serta peningkatan partisipasi investasi swasta;
- Peningkatan pemanfaatan potensi gas bumi
- Peningkatan penggunaan komponen, aplikasi dan teknologi dalam negeri;
- Peningkatan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan;
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas konsumsi listrik di sisi konsumen.

STRATEGI

- Tercapainya pangsa pemanfaatan energi baru dan terbarukan minimal 14,1% dari konsumsi energi nasional pada tahun 2014 melalui prioritas pemanfaatan potensi energi terbarukan (mikrohidro, surya, biomassa, angin) bagi pembangkit listrik skala kecil dan menengah terutama untuk daerah perdesaan
- Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi sehingga turun rata-rata 1 % per tahun
- Peningkatan peran serta daerah di bidang pemanfaatan energi
- Peningkatan pengembangan gas kota
- Peningkatan investasi sektor energi melalui peningkatan porsi pendanaan melalui pemberdayaan lembaga keuangan dan non keuangan terutama lembaga domestik
- Penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
- Pelaksanaan konservasi energi

4. Ketenagalistrikan

ARAH KEBIJAKAN

- rehabilitasi dan repowering dan pembangunan pembangkit listrik;
- pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dan berwawasan lingkungan;
- pengembangan diversifikasi energi mengedepankan energi terbarukan, termasuk tenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat;
- pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional yang mengedepankan peningkatan kandungan lokal dan pengembangan daya guna iptek, termasuk pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan nasional;
- pembangunan jaringan pipanisasi gas yang terintegrasi;
- pengembangan sarana dan prasarana pembangkit panas bumi dan energi alternatif terbarukan, terutama mikrohidro dan energi surya.
- Mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan;
- Menjaga keamanan ketersediaan energi

STRATEGI

- Penyehatan PKUK/korporat, Pengembangan PKUK yang berkelanjutan melalui pengaturan ROR dengan suatu PP khusus. (Penyesuaian TDL secara bertahap, jika diperlukan melalui regionalisasi tarif, dengan mempertimbangkan kinerja optimalisasi energi mix dan efisiensi)
- Pengembangan pembangkit utama PLTU batubara dan PLTU mulut tambang di Sumatera dan Kalimantan, dan Pump Storage untuk menggantikan peaking BBM
- Pengembangan interkoneksi antar region, antar pulau dan antar negara untuk sekuriti dan efisiensi biaya.
- Prinsip regional balance khususnya untuk Jawa yang energi primernya dari luar pulau.
- Interkoneksi antar wilayah dan antar negara. Interkoneksi meningkatkan sekuriti dan efisiensi biaya penyediaan tenaga listrik.
- Peningkatan kapasitas PHLN pemerintah untuk pembangunan ketenagalistrikan
- Peningkatan partisipasi investasi swasta melalui manajemen pembagian resiko yang lebih kondusif bagi investor serta standar jual beli listrik yang menarik.
- Memanfaatkan teknologi yang mutakhir untuk menghemat biaya operasi dan pemeliharaan dan meningkatkan pelayanan, dengan tetap mempertimbangkan peningkatan komponen dalam negeri seoptimal mungkin.
- Peningkatan produksi energi primer nasional (terutama gas dan batubara) yang diprioritaskan untuk kebutuhan energi dan ketenagalistrikan nasional
- Peningkatan partisipasi investasi swasta perlu pengembangan manajemen pembagian resiko yang lebih kondusif bagi investor
- Peningkatan investasi pemerintah dan investasi swasta domestik dalam pembangunan ketenagalistrikan di daerah perdesaan, terpencil dan terisolasi yang memprioritaskan pada pemanfaatan energi terbarukan dan meningkatkan ekonomi produktif setempat

5. Pos dan Telematika

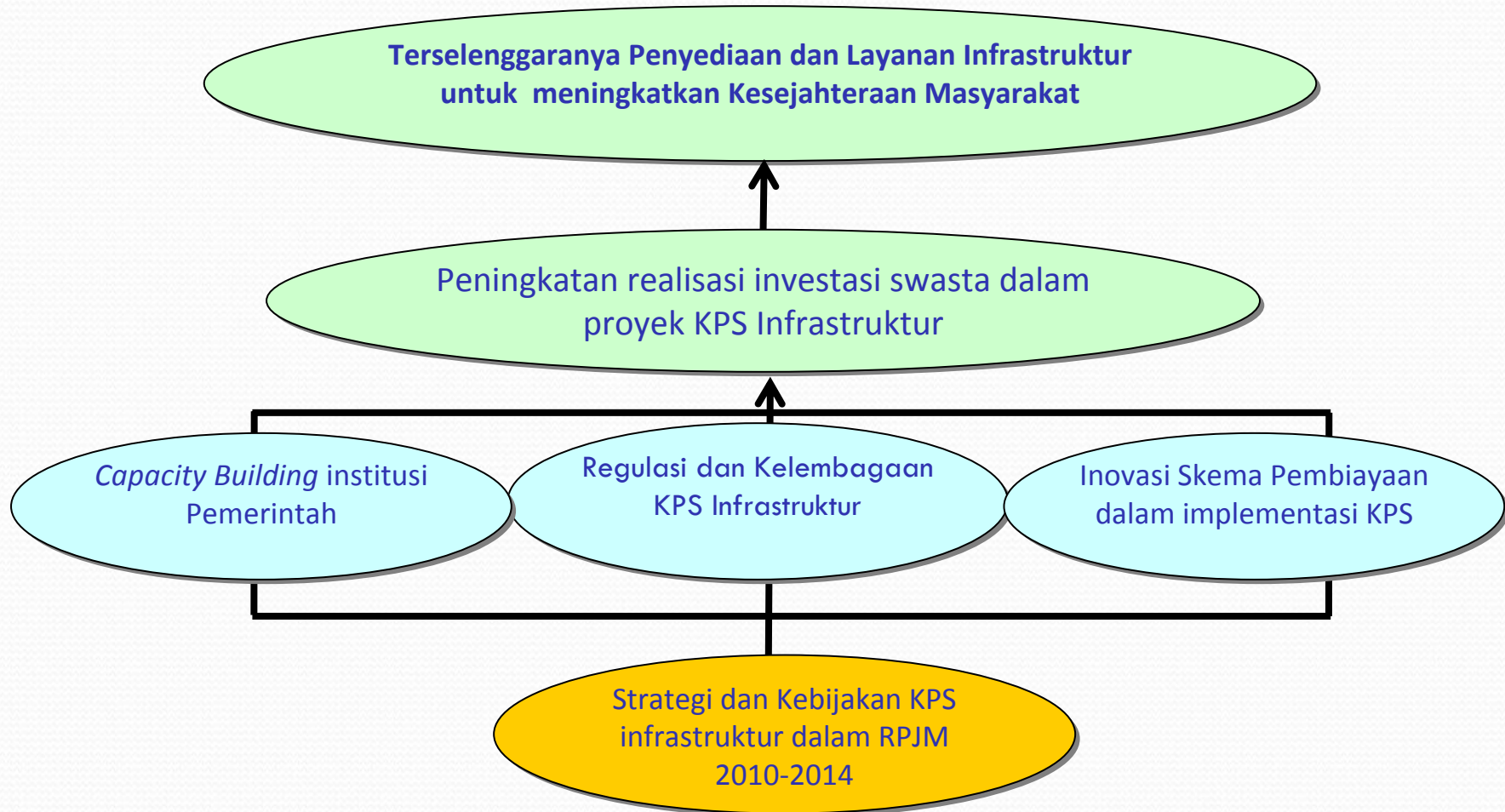
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penciptaan Sektor yang Efisien, Kompetitif, <i>Robust</i> dan <i>Sustainable</i>	(1) Penguatan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan; (2) Penataan ulang struktur industri; (3) Pembukaan peluang usaha; (4) Penguatan badan regulasi
Pengembangan Infrastruktur Modern, <i>Broadband</i> , dan <i>Secured</i>	(1) Pengembangan skema KPS; (2) Implementasi konsep teknologi netral; (3) Pengelolaan sumber daya terbatas; (4) Peningkatan <i>cyber security</i> ; (5) Pemberdayaan lokal <i>community-based</i> ; (6) Implementasi konsep <i>infrastructure sharing</i> ; (7) Pergeseran CAPEX menjadi OPEX; (8) Peningkatan peran Depkominfo dalam optimalisasi penggunaan infrastruktur TIK antar K/L
Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Non Komersial	(1) Reformasi sektor untuk mendorong peran swasta; (2) Penentuan target PSO/USO secara jelas dan terdefinisi baik
Penciptaan <i>e-Leadership</i> , Apresiasi, dan Komitmen Bagi Pengembangan TIK Nasional	Pendidikan dan pelatihan TIK terutama bagi <i>Chief Information Officer</i>
Pengembangan <i>e-Government</i>	(1) Penyelesaian perangkat regulasi terkait implementasi <i>e-Government</i> ; (2) Penggunaan <i>shared applications</i> ; (3) <i>Roll out</i> proyek <i>e-Government</i> ;
Peningkatan e-Literasi	(1) Pembangunan pusat diklat TIK di daerah; (2) Fasilitasi penyediaan akses TIK
Pengembangan Aplikasi, Sistem, Layanan berbasis TIK	(1) Pengembangan <i>open source</i> ; (2) Pengembangan konten lokal
Peningkatan Penggunaan Industri Dalam Negeri dalam Pengembangan TIK Nasional	
Pemanfaatan TIK secara Sinergi untuk Kegiatan Lintas Sektor	

6. Permukiman dan Perumahan



7. PENGEMBANGAN KPS INFRASTRUKTUR

ARAH KEBIJAKAN



7. PENGEMBANGAN KPS INFRASTRUKTUR

STRATEGI

- *Inward looking*
 - Fokus pada sumber daya lokal: perbankan lokal dan swasta lokal
 - Konsentrasi pada proyek infrastruktur skala menengah dan kecil
 - Mendorong peran Bank Pembangunan Daerah, Bank Pemerintah dan Bank Nasional sebagai sumber pendanaan (*lender*), dengan dukungan Pemerintah sebagai penjamin
- *Inovasi skema pembiayaan*
 - *Design Build Lease* ; Pemerintah mencari *loan* untuk membangun infrastruktur baru, kemudian menawarkan kepada swasta untuk mendesain, membangun proyek infrastruktur tersebut dengan menggunakan *loan* yang ada. Selanjutnya kontraktor mensewa-mengoperasionalkan fasilitas infrastruktur itu dengan tarif tertentu yang dapat digunakan untuk membayar hutang (akibat *loan*), menutupi biaya O&M dan keuntungan operasional.



BAGIAN 5

Prioritas dan Fokus Infrastruktur

2010-2014

1. Sumber Daya Air

Prioritas 1

- Konservasi Sumber Daya Air

Fokus

- Peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air.
- Optimalisasi pemanfaatan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air.
- Peningkatan jaminan kelestarian fungsi danau dan situ.

Prioritas 2

- Pendayagunaan Sumber Daya Air

Fokus

- Peningkatan luas dan tingkat layanan jaringan irigasi melalui pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan, dan industri.

Prioritas 3

- Pengendalian Daya Rusak Air

Fokus

- Penurunan kawasan terkena dampak banjir dan tanah longsor melalui pembangunan, rehabilitasi, serta OP sarana/prasarana pengendali banjir dan pengendali lahar/sedimen
- Peningkatan panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai.

2. Transportasi: Subsektor Jalan dan Perkeretaapian

PRIORITAS SEKTOR JALAN

- Pengembangan Jaringan Jalan dan Perkuatan Institusi

FOKUS

- Program *Preservation*;
- Sasaran kondisi jalan pada akhir 2014:
 - Kondisi Mantap (Tahun 2009: 89% → 2014 : 100%)
 - Rusak ringan (Tahun 2009: 11% → 2014 0%)
 - Rusak berat: 0%
 - Kecepatan Rata-Rata (Tahun 2009: 49 Km/jam → 2014: 60 Km/jam)
- Terbentuknya institusi pemeliharaan jalan di daerah yang berbasis kinerja;
- *Extended Warranty Period* dan *Performance Based Contract* merupakan alternatif kontrak yang bertujuan untuk mendukung keandalan dalam preservasi jalan.

PRIORITAS PERKERETAAPIAN

- Peningkatan kinerja pelayanan dan keselamatan

FOKUS

- Mempertahankan Standar Pelayanan Minimal;
- Optimalisasi dan pemulihan kondisi jaringan;
- Pengembangan jaringan baru & peningkatan kapasitas lintas;
- Pengembangan regulasi dan kelembagaan;
- Pengembangan SDM dan Teknologi Perkeretaapian.

2. Transportasi:

Subsektor Transportasi Laut dan Udara

PRIORITAS TRANSPORTASI LAUT

- Peningkatan kinerja pelayanan dan keselamatan Pelayaran

FOKUS

- Pemisahan fungsi regulator dan operator di pelabuhan
- Keselamatan dan keamanan pelayaran
- Kelaiklautan kapal
- Syahbandar
- Perlindungan lingkungan maritim
- Sistem informasi pelayaran
- Peran serta masyarakat
- Penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard)

PRIORITAS TRANSPORTASI UDARA

- Peningkatan kinerja pelayanan dan keselamatan Penerbangan

FOKUS

- Meningkatkan keselamatan operasi
- Menerapkan kerangka kerja tata pemerintahan yang baik
- Meningkatkan kualitas SDM transportasi Udara
- Meningkatkan efisiensi operasi dan pelayanan
- Percepatan dalam implementasi teknologi

3. Energi

PRIORITAS

- Pemenuhan jaminan pasokan energi nasional secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, bagi pembangunan berkelanjutan

FOKUS

- Pencapaian komposisi bauran energi yang optimal
- Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi pasokan energi nasional

4. Ketenagalistrikan

PRIORITAS

- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan.

FOKUS

- rehabilitasi dan repowering dan pembangunan pembangkit listrik;
- pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dan berwawasan lingkungan;
- pengembangan diversifikasi energi mengedepankan energi terbarukan, termasuk tenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat;
- pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional yang mengedepankan peningkatan kandungan lokal dan pengembangan daya guna iptek, termasuk pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan nasional;
- pembangunan jaringan pipanisasi gas yang terintegrasi;
- pengembangan sarana dan prasarana pembangkit panas bumi dan energi alternatif terbarukan, terutama mikrohidro dan energi surya.

5. Pos dan Telematika

PRIORITAS 1

- Reformasi Sektor

FOKUS

- Pembinaan/Pengaturan/Pengelolaan Sektor/Industri (Kompetitif, Robust dan Sustainable)
- Pengawasan Penyelenggaraan & Mediasi Dispute

PRIORITAS 2

- Pengembangan Infrastruktur Broadband dan Secured

FOKUS

- Pengelolaan Sumber Daya Terbatas, Teknologi, dan Konvergensi.
- Roll Out Wilayah Non Komersial (P/USO)
- Roll Out melalui KPS (Perijinan dan Skema Lainnya)

PRIORITAS 3

- Pemanfaatan dan Pengembangan TIK

FOKUS

- Pencegahan cyber crime
- Pengembangan e-Government
- Pemasyarakatan TIK serta peningkatan e-literasi dan Kualitas SDM TIK
- Pengembangan Aplikasi/Local Content
- Pengembangan Litbang dan Industri Dalam Negeri Bidang TIK

6. Permukiman dan Perumahan

PRIORITAS 1

- Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal

FOKUS

- Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau
- Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi

PRIORITAS 2

- Peningkatan daya saing sektor riil

FOKUS

- Peningkatan keterpaduan kawasan industri, pariwisata dan perdagangan dengan infrastruktur permukiman
- Pelayanan air minum dan sanitasi pada kawasan industri, pariwisata dan perdagangan

7. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Prioritas 1

- Penyusunan Peraturan dan Kebijakan

Fokus

- Penyusunan Undang-Undang terkait Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Perpres menjadi Undang-Undang)
- Penyusunan PP terkait operasionalisasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Operational Guidelines Manual menjadi Peraturan Pemerintah)
- Penyusunan format baku dokumen tender Kerjasama Pemerintah Swasta

Prioritas 2

- Penataan dan Pembentukan Kelembagaan

Fokus

- Pemisahan peran/fungsi badan pembuat kebijakan, regulator, operator, dan badan pemberi kontrak
- Optimalisasi fungsi Bappenas sebagai Unit Pusat Pengembangan KPS (P3CU)
- Pembentukan simpul-simpul KPS di daerah dan departemen terkait

Prioritas 3

- Penguatan Pembiayaan

Fokus

- Pemberian Dukungan Pemerintah (Government Support)
- Dana Penjaminan (Guarantee Fund)
- Dana Infrastruktur (Infrastructure Fund)

Prioritas 4

- Bantuan Teknis

Fokus

- Capacity Building
- Identifikasi Proyek KPS, Studi Kelayakan, dan Market Sounding
- Tender, Negosiasi, dan Kontrak Kerjasama



BAGIAN 6

Peluang

Proyek Kerja Sama

Pemerintah Swasta

Ringkasan Proyek-Proyek Infrastruktur KPS (PPP Book)

SEKTOR	KATEGORI			
	SIAP LELANG	PRIORITAS	POTENSIAL	Jumlah
1. Jalan Tol	3	8	21	32
2.1. Air Transportation	0	0	3	3
2.2. Land Transportation	0	0	1	1
2.3. Marine Transportation	1	0	5	6
2.4. Railways	1	0	14	15
3. Water Supply	1	8	11	20
4. Power	1	0	7	8
Jumlah	8	16	61	85

Ringkasan Investasi Proyek KPS (85 Proyek)

1 Jumlah Investasi Proyek-Proyek Siap Lelang (US \$ 000)	4,573,094
2 Jumlah Investasi Proyek-Proyek Prioritas (US \$ 000)	2,970,560
3 Jumlah Investasi Proyek-Proyek Potensial (US \$ 000)	26,425,575
Jumlah Investasi Proyek-Proyek PPP (US \$ 000)	33,969,229

Daftar Proyek Siap Tender

No	Project Title	Lokasi Propinsi
1	Medan – Binjai Toll Road	Sumatera Utara
2	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road	Sumatera Utara
3	Cileunyi – Sumedang – Dawuan Toll Road	Sumedang, Jawa Barat
4	Tanah Ampo Cruise Terminal, Karangasem	Karangasem Regency, Bali
5	Palaci - Bangkuang Railway	Sungai Barito, Kalimantan Tengah
6	Soekarno Hatta Airport - Manggarai, Railway Development	DKI Jakarta dan Banten
7	Bandung Municipal (Cimenteng) Water Supply	Cimenteng, Bandung, Jawa Barat
8	Central Java Coal Fired Steam Power Plant (Up to 2000 MW)	Pemalang, Jawa Tengah

Daftar Proyek Prioritas

No	Project Title	Lokasi Propinsi
9	Pekanbaru – Kandis - Dumai Toll Road	Riau
10	Palembang – Indralaya Toll Road	Sumatera Selatan
11	Tegineneng – Babatan Toll Road	Lampung, Sumatera Selatan
12	Sukabumi – Ciranjang Toll Road	Jawa Barat
13	Pasir Koja – Soreang Toll Road	Bandung Selatan
14	Pandaan – Malang Toll Road	Jawa Timur
15	Serangan – Tanjung Benoa Tll Road	Bali
16	Manado – Bitung Toll Road	Sulawesi Utara
17	Medan Municipal	Sunggal, Medan, Sumatera Utara
18	Bandar Lampung Municipal Water Supply	Bandar Lampung
19	DKI Jakarta - Bekasi - Karawang Water Supply	DKI Jakarta dan Jawa Barat
20	West Cikarang & Cibitung Bekasi Regency Water Supply	Jawa Barat
21	Bandung Regency Water Supply	Jawa Barat
22	Sumedang Regency, Water Supply	Sumedang, Jawa Barat
23	Indramayu Regency Water Supply	Pamayahan, Indramayu, Jawa Barat
24	Cirebon Water supply	Cirebon/ Kuningan, Jawa Barat

Daftar Proyek Potensial (1)

No	Project Title	Lokasi Propinsi
25	Kisaran - Tebing Tinggi, Toll Road	Kisaran dan Tebing Tinggi, Sumatera Utara
26	Bukit Tinggi - Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang, Toll Road	Sumatera Barat
27	Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim Toll Road	Kepulauan Riau
28	Terbanggi Besar - Menggala - Pematang Panggang Toll Road	Lampung
29	Bakauheni – Terbanggi Besar, Toll Road	Lampung
30	Cilegon - Bojonegara, Toll Road	Jawa Barat dan Jawa Tengah
31	Kamal - Teluk Naga - Batu Ceper, Toll Road	Banten
32	Kemayoran - Kampung Melayu, Toll Road	DKI Jakarta
33	Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper, Toll Road	DKI Jakarta
34	Ulujami - Tanah Abang, Toll Road	DKI Jakarta
35	Pasar Minggu - Casablanca, Toll Road	DKI Jakarta
36	Sunter - Pulo Gebang – Tambelang, Toll Road	DKI Jakarta
37	Duri Pulo - Kampung Melayu, Toll Road	DKI Jakarta
38	Tanjung Priok Access	DKI Jakarta
39	Terusan Pasteur - Ujung Berung – Cileunyi, Toll Road	Jawa Barat
40	Ujung Berung - Gedebage – Majalaya Toll Road	Jawa Barat
41	Semarang - Demak Toll Road	Jawa Tengah
42	Yogyakarta – Bawen, Toll Road	Yogyakarta
43	Yogyakarta - Solo, Toll Road	Yogyakarta - Jawa Tengah
44	Bandara Juanda - Tanjung Perak, Toll Roa	Jawa Timur
45	Probolinggo - Banyuwangi, Toll Road	Jawa Timur

Daftar Proyek Potential (2)

No	Project Title	Lokasi Propinsi
46	Kertajati International Airport	Jawa Barat
47	Sentani Airport	Papua
48	Juwata Tarakan Airport	Kalimantan Timur
49	Bojonegara - Ketapang (Jawa - Sumatera) Ferry Terminal	Banten - Lampung
50	Bojonegara Port	Banten
51	Expansion of Kumai Port, Kotawaringin Barat Regency	Kalimantan Tengah
52	Development Lupak Dalam Port, Kapuas Regency	Kalimantan Tengah
53	Expansion of Teluk Sigintung Port, Seruyan Regency	Kalimantan Tengah
54	Expansion Of Anjir Kelampan and Anjir Serampan Canal	Kalimantan Tengah
55	Kualanamu Airport Railway Development	Sumatera Utara
56	West Sumatera Railway	Sumatera Barat
57	Simpang - Tanjung Api-api Railway	Sumatera Selatan
58	Tanjung Enim - Batu Raja Railway	Sumatera Selatan
59	Lahat - Kertapati Railway	Sumatera Selatan
60	Railway Facility -Blue and Green Line (Jakarta Monorail)	DKI Jakarta
61	Gedebage, Bandung Municipal, Integrated Terminal (Railway)	Jawa Barat
62	Bangkuang - Lupak Dalam Railway	Kalimantan Tengah
63	Kudangan - Kumai Railwa	Kalimantan Tengah
64	Puruk Cahu - Kuala Pembuang, Railway	Kalimantan Tengah
65	Tumbang Samba - Nanga Bulik, Railway	Kalimantan Tengah

Daftar Proyek Potensial (3)

No	Project Title	Lokasi Propinsi
66	Kuala Kurun - Palangka Raya - Pulau Pisau - Kuala Kapuas, Railway	Kalimantan Tengah
67	East Kalimantan Railway (Puruk Cahu – Balikpapan)	Kalimantan Timur
68	Pondok Gede, Bekasi Municipal, Water Supply	Bekasi (Kab)
69	Surakarta - Sukoharjo, Central Java Province, Water Supply	Jawa Tengah
70	Klungkung Regency (Tukad Unda), Water Supply	Bali
71	Maros Regency, Water Supply	Sulawesi Selatan
72	West Bandung (Alternative I), Water Conveyance	Jawa Barat
73	West Bandung (Alternative II), Water Conveyance	Jawa Barat
74	East Bandung (Alternative I), Water Conveyance	Jawa Barat
75	East Bandung (Alternative II) Water Conveyance	Jawa Barat
76	Semarang (Alternative I), Water Conveyance	Jawa Tengah
77	Semarang (Alternative II), Water Conveyance	Jawa Tengah
78	Semarang (Alternative III) Water Conveyance	Jawa Tengah
79	New North Sumatera Coal Fired Steam Power Plant (2x200 MW)	Sumatera Utara
80	South Sulawesi New Coal Fired Steam Power Plant (200 MW)	Sulawesi Selatan
81	North Sulawesi Coal Fired Steam Power Plant (2 x 55 MW)	Sulawesi Utara
82	North Sulawesi New Coal Fired Steam Power Plant (55 MW)	Sulawesi Utara
83	North Sumatera (Infrastructure) (2 x 100 MW)	Sumatera Utara
84	Sumatera Mine Mouth HVDC Coal Fired Steam Power Plant (2 x 200 MW)	Sumatera Selatan
85	East Kalimantan (Infrastructure) Coal Fired Steam Power Plant (2 x 65 MW)	Kalimantan Timur



BAGIAN 7

Peluang Usaha

Peran Jasa Konstruksi dalam Perekonomian Nasional

- Usaha jasa konstruksi memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
- Pertumbuhan sektor konstruksi selama tahun 2006 mencapai 7,86%, dimana porsi sektor konstruksi terhadap PDB tahun 2006 mencapai 6,51%.
- Lapangan usaha di bidang jasa konstruksi masih sangat tergantung kepada ketersediaan dana pembangunan pemerintah, sementara itu anggaran pembangunan pemerintah relatif menurun.

Peningkatan Kemampuan Berkompetesi dalam Jasa Konstruksi

- Pelaku Usaha Konstruksi harus mampu bersaing dan berkompetesi dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan
- Meninggalkan Budaya Arisan maupun mensubkan pekerjaan
- Bekerja Profesional dan dikontrak hanya oleh satu perusahaan dan tidak over lap

Peluang Usaha Jasa 1)

- **Seleksi dan Prioritisasi Proyek:**
 - Identifikasi proyek potensial, kajian *value for money*, penyusunan program prioritas.
- **Studi Kelayakan dan Ui Tuntas:**
 - Studi Kelayakan → Kajian Teknis, Kelayakan Finansial, Kajian Hukum, Kajian Skema KPS, Analisa Tarif dan Risiko
 - Fasilitasi Konsultasi Publik
 - Penjajagan Pasar (*Market Sounding*)
 - Contoh: *Market Sounding Batch IV Toll Road*, FS Terminal Ferry Margagiri Ketapang, Kajian Pasokan Gas PLTGU Pasuruan.
- **Proses Tender:**
 - Pendampingan dalam penyusunan dokumen lelang.
 - Bantuan pencarian dan pemilihan investor.
 - Contoh: Pendampingan transaksi Proyek Air Minum Kota Bandung.
- **Proses Negosiasi:**
 - Pendampingan dalam negosiasi, transaksi, dan *financial close*.
 - Kontrak kerjasama.
- **Manajemen Kontrak:**
 - Penyusunan DED.
 - Manajemen konstruksi dan supervisi.
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPS.

Peluang Usaha Jasa (2)

- **Penguatan Kelembagaan:**

- *Capacity Building*
- *Studi Pengembangan Kelembagaan*
- *Contoh: Studi Pembentukan P3CU dan P3 Nodes.*

- **Kajian Legal dan Kebijakan:**

- Kajian hukum dalam penyiapan dan perencanaan proyek
- *Legal advice* bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak
- Penyusunan kebijakan dan peraturan
- Contoh: Revisi Perpres 67/2005, Kajian Kerangka Kebijakan (*Regulatory Framework Study*).

- **Penyiapan Proyek *Unsolicited*:**

- Konsultan dapat menciptakan proyek bersama investor dan/atau Pemerintah Daerah dan menyiapkan kajian-kajian yang dibutuhkan: Master Plan, Studi Kelayakan, dll.
- Contoh: - Kajian 6 Ruas Jalan Tol DKI Jakarta,
- Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, dll

ALOKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2009 (TANPA ESDM DAN KOMINFO)

Juta Rupiah

NO	PROVINSI	ALOKASI 2009		TOTAL
		MURNI	PHLN	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	971.161,91	581.691,77	1.552.853,68
2	SUMATERA UTARA	1.863.992,30	484.003,70	2.347.996,01
3	SUMATERA BARAT	712.743,44	174.762,47	887.505,91
4	RIAU	578.187,41	135.297,68	713.485,09
5	KEPULAUAN RIAU	409.493,38	7.472,53	416.965,91
6	JAMBI	626.210,44	93.299,78	719.510,22
7	BENGKULU	422.458,22	69.678,66	492.136,88
8	SUMATERA SELATAN	822.038,47	247.976,11	1.070.014,58
9	BANGKA BELITUNG	334.922,29	62.375,33	397.297,62
10	LAMPUNG	764.025,65	196.865,27	960.890,92
11	DKI JAKARTA	931.717,97	342.048,33	1.273.766,30
12	BANTEN	376.334,97	145.401,72	521.736,70
13	JAWA BARAT	1.851.248,13	883.193,40	2.734.441,54
14	JAWA TENGAH	2.440.286,03	1.326.342,51	3.766.628,54
15	DI YOGYAKARTA	406.999,13	94.333,63	501.332,76
16	JAWA TIMUR	2.859.578,27	797.031,83	3.656.610,10
17	KALIMANTAN BARAT	802.586,34	140.583,62	943.169,97

NO	PROVINSI	ALOKASI 2009		TOTAL
		MURNI	PHLN	
18	KALIMANTAN TENGAH	1.177.035,11	62.912,98	1.239.948,10
19	KALIMANTAN TIMUR	1.203.164,04	24.629,31	1.227.793,35
20	KALIMANTAN SELATAN	697.318,59	251.779,02	949.097,61
21	BALI	633.295,06	151.028,38	784.323,43
22	NUSA TENGGARA BARAT	521.998,09	224.828,27	746.826,35
23	NUSA TENGGARA TIMUR	967.381,50	117.818,59	1.085.200,09
24	SULAWESI UTARA	852.095,18	80.339,14	932.434,33
25	GORONTALO	464.892,96	42.797,25	507.690,22
26	SULAWESI TENGAH	857.273,42	57.185,72	914.459,13
27	SULAWESI BARAT	441.531,37	242.515,22	684.046,59
28	SULAWESI SELATAN	1.478.510,30	636.704,21	2.115.214,50
29	SULAWESI TENGGARA	535.801,33	70.748,65	606.549,98
30	MALUKU	1.110.057,13	67.751,58	1.177.808,71
31	MALUKU UTARA	625.282,22	22.894,01	648.176,22
32	PAPUA	1.547.952,53	18.001,30	1.565.953,83
33	PAPUA BARAT	857.857,54	9.009,15	866.866,68
34	PUSAT	6.109.276,22	1.700.541,07	7.809.817,29
JUMLAH TOTAL		37.254.706,95	9.563.842,19	46.818.549,14



TERIMA KASIH